

TPID PALANGKA RAYA SIDAK PASAR TRADISIONAL JELANG LEBARAN



Sumber gambar: <https://kalteng.antaranews.com/>

Palangka Raya (ANTARA) - Tim Penanggulangan Inflasi Daerah (TPID) Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng), melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Besar menjelang momen Lebaran atau Idul Fitri 1445 Hijriah.

"Sidak ini sebagai salah satu upaya memastikan harga dan ketersediaan kebutuhan pokok aman serta stabil jelang Lebaran," kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Aratuni di Palangka Raya, Senin.

Dia menambahkan, berdasar hasil sidak di induk pasar tradisional itu, saat ini harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok masyarakat di tingkat distributor dan yang diujakan pedagang di pasar masih aman.

"Terkait harga di pasaran, sejauh ini masih bisa terjangkau oleh masyarakat dan belum ada kenaikan yang signifikan. Ketersediaan sembako masih normal, masih cukup," kata Aratuni.

Dia menambahkan, Pemkot Palangka Raya dan juga pihak terkait yang tergabung di TPID akan terus melakukan identifikasi penyebab terjadinya lonjakan harga sembako di pasaran.

Menurut dia, adanya kenaikan harga sejumlah bahan pangan itu kemungkinan permintaan meningkat menjelang Idul Fitri 1445 Hijriah. Sejauh ini tidak ada kenaikan yang signifikan dan harga masih fluktuatif.

"Yang kita upayakan adalah ketersediaan dan kenaikan harga dalam kategori normal, bukan meniadakan kenaikan," katanya.

Aratuni juga menegaskan komitmen Pemkot Palangka Raya untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga kebutuhan pokok selama periode penting ini.

"Kami berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan semua pihak terkait guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok agar tetap terjangkau oleh masyarakat," katanya.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahyu juga memerintahkan jajarannya untuk meningkatkan kolaborasi antardinas dan badan di

lingkup pemerintah setempat dalam upaya mengendalikan harga selama momen Ramadhan dan Idul Fitri. Kolaborasi ini untuk memperkuat program dan meningkatkan efektivitas pengendalian inflasi dari berbagai sektor.

Bentuk kolaborasi ini antara lain saat Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian (DPKUKMP) menggencarkan operasi pasar murah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) melakukan gerakan menanam tanaman hortikultura.

Kemudian Dinas Perikanan menyalurkan berbagai bentuk bantuan baik sarana dan prasarana kepada para nelayan dan pembudidaya yang diperkuat penebaran bibit ikan di perairan umum.

"Dalam sisi pengawasan DPKUKMP juga melibatkan aparat penegak hukum untuk memastikan pasokan, rantai pasok, dan harga bahan pangan di pasaran tidak dipermainkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," kata Hera.

Sumber Berita:

1. <https://kalteng.antaranews.com/berita/687531/tpid-palangka-raja-sidak-pasar-tradisional-jelang-lebaran>, Senin, 1 April 2024.
2. <https://www.rri.co.id/daerah/619570/pemko-sidak-pasar-tradisional-guna-tekan-kenaikan-harga>, Selasa, 2 April 2024.

Catatan:

Pasal 1 angka 17 Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Kebijakan Pengendalian Inflasi Dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan Inflasi adalah kenaikan harga barang secara umum dan berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Inflasi didefinisikan kemerosotan nilai uang (kertas) karena banyaknya dan cepatnya uang (kertas) beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengendalian Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah, mendefinisikan Inflasi adalah proses meningkatnya harga barang-barang dan/atau jasa-jasa atau menurunnya nilai uang secara terus menerus. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Tengah adalah tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan bertugas menjaga keterjangkauan harga barang-barang dan/atau jasa-jasa melalui pengendalian inflasi di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.